

# RENCANA KERJA TAHUN 2025



*DINAS PERTANIAN PANGAN DAN  
PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG*

**KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2025, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

.Rencana Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang, APBD Provinsi dan APBN, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu

Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Februari 2024

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan  
Kota Tanjungpinang,



**YONI FADRI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700503 200312 1 006

## DAFTAR ISI

Halaman	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	12
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	17
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	17
3.2. Tujuan dan Sasaran OPD.....	17
3.2. Program dan Kegiatan.....	18
BAB IV. PENUTUP .....	26
LAMPIRAN	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2023 telah ditetapkan RPD Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa transisi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Organisasi mempunyai tugas membantu urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan untuk pelaksanaan urusan pangan, pertanian dan perikanan. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian Kinerja Pj Walikota dalam mengemban amanat Presiden maka Dinas Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang perlu menyusun Rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah tersebut adalah Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Daerah (Renja). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

- Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
  11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
  12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang

Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 43);
16. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD mempunyai maksud sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun sebelumnya dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2025
- Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk memasukkan Rencana Program / kegiatan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2025

### 1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2025, sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

**BAB IV. PENUTUP**

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Sebelum menyusun Rencana Kerja Tahun 2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan juga tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2022. Evaluasi Rencana Kerja OPD memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja OPD Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dan Pencapaian Perencanaan Strategisnya, dapat dilihat pada tabel di bawah :





No	Kode	Unitas / Bidang Unitas Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPMD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RPMD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD P yang Dievaluasi	Persetujuan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD P yang Dievaluasi (%)	Keterangan	Permasalahan di Meeting-Meeting Indikator	Upaya Mengatasi Permasalahan										
					RPMD	APBD	RPMD Perubahan	APBD Perubahan	I	II	III	IV															
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13 / 8 * 100	15	16	17										
K													Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn
PREDIKAT KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													T	ST													

D

TANJUNGPINANG, JANUARI 2024  
KEPALA DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN



YONLEABRI  
Pembina TK I  
NIP. 19700503 200312 1 006

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kajian Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

No.	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Realisasi Capaian	Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan (%)	59,7	60	<b>62</b>	64	66	68	<b>67,99</b>	73
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,6	92	<b>92</b>	94	94	95	<b>91,10</b>	93
3	Ketersediaan Pangan Utama (%)	80,13	95	<b>96</b>	97	98	99	80,43	90
4	Angka Kecukupan Energi ketersediaan (kg/kap/th)	1.713	2.300	<b>2.310</b>	2.320	2.330	2.340	2.387	2.390
5	Angka Kecukupan Protein Ketersediaan (Kg/Kap/th)	45,37	57	<b>58</b>	59	60	61	61,10	61
6	Angka Kecukupan Energi Konsumsi (Kg/Kap/th)	2.100	2.150	<b>2.150</b>	2.150	2.150	2.150	2121	2.100
7	Angka Kecukupan Protein konsumsi (Kg/Kap/th)	73,2	74	<b>74</b>	74	74	74	70	74
8	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen (%)	2,69	<10	<b>&lt;10</b>	<10	<10	<10	3,5	<15



No.	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Realisasi Capaian	Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat (%).	63,87	78,46	81,46	84,46	87,46	90,46	65	77
10	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman (%).	80	90	90	90	95	95	100	90
11	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.947	2.800	3.000	3.300	3.500	3.700	4385,24	3.600
12	Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	43,3	43,3	43,5	43,7	43,9	44	49,84	
13	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	5	10	10	10	10	11	50	20
14	Nilai Ekspor Perikanan	18,75	18,88	19,01	19,14	19,28	19,41	7,05	-
15	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	80,22	95	115	130	140	150	182,57	175
16	Persentase pembudidayaan ikan menerapkan CBIB	57,00	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00	80	80,00
17	Jumlah produksi tanaman palawija	505	515	525	535	545	560	250,45	180
18	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	1.158	1.125	1.150	1.175	1.200	1.225	1.352,82	1.230
19	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	76	100	101	105	107	109	85,35	50

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Realisasi Capaian	Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Cakupan Bina Kelompok (%)	85	90	95	100	100	100	100	100
21	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	2.722	2.858	3.000	3.150	3.307	3.472	3.457,19	3.500
22	Populasi Ternak	296.740	311.567	327.154	343.512	360.687	378.721	293.227	
23	Tingkat Kematian Ternak	3,7	3,5	3	2,5	2	2	2,4	2
24	Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	16	2	2	2	2	2	2,56	2
25	Nilai Jual Hasil Produk Peternakan Kelompok Ternak Binaan.	16.911.500	17.216.700	17.522.000	17.926.300	18.129.500	18.329.600	28.57	20,50

**2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menjalankan urusan pemerintah pada Urusan Wajib yang tidak pelayanan dasar yaitu Urusan Pangan dan Urusan Pilihan pada Urusan Perikanan dan Pertanian. Dalam pelaksanaan urusan tersebut perlu adanya analisis lingkungan yang merupakan peluang dan tantangan di Lingkungan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran strategis Kota Tanjungpinang. Tantangan dan Peluang yang teridentifikasi sebagai berikut :

**a. Tantangan**

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan

Pengembangan Pelayanan Dinas Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

**Urusan Pangan :**

- a. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya menjadi tantangan dalam penyediaan pangan, yang sangat ditentukan oleh produksi pangan lokal dan pasokan pangan dari luar daerah.
- b. Rendahnya produksi pangan lokal dan tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah sangat berpengaruh pada stabilitas harga pangan sehingga distribusi dan pemantauan harga pangan menjadi hal yang prioritas.
- c. Pemahaman terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih rendah yang dipengaruhi adat dan tradisi serta kebiasaan makan.
- d. Penggunaan pestisida, bahan kimia dan bahan tambahan pangan yang cenderung meningkat pada pangan terutama komoditas import segar segar dan kurangnya pemahaman terhadap produk pangan hewani yang higienis memerlukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang beredar.
- e. Tingginya permintaan daging sedangkan harga daging segar di tanjungpinang cukup mahal, sehingga menjadi potensi pemasukan illegal yang harganya lebih murah. Sebagai daerah pemasaran terhadap komoditi pertanian dan peternakan yang diproduksi oleh daerah tetangga ( Bintan dan Batam) sedangkan tidak terdapat *check point* sehingga pengawasan lalulintas belum optimal yang berisiko masuk dan menyebarkan penyakit melalui media pembawa.
- f. Belum adanya regulasi terkait pengaturan teknis lalulintas komoditi dari maupun ke wilayah Kota Tanjungpinang.

**Urusan Pertanian**

- a. Ketersediaan lahan cenderung terus menurun karena alih fungsi lahan untuk perluasan perumahan, perdagangan dan sektor-sektor lainnya dan ditambah ketidakjelasan status kepemilikan lahan yang tersedia.

- b. Ancaman perubahan iklim global yang berdampak pada perubahan pola cuaca dan intensitas curah hujan, yang menyebabkan bergesernya pola tanam dan rentannya muncul hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.
- c. Lokasi pertanian terpencar dengan luasan lahan budidaya yang relatif kecil, sehingga menjadi kurang efisien yang mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi.
- d. Kelembagaan tani yang masih lemah dalam kemitraan usaha, pemodalannya dan pemanfaatan peluang pasar.
- e. Pola pikir dan perilaku petani yang masih berorientasi pada aspek produksi tanpa memperhatikan mutu, sehingga harga yang diterima petani relatif rendah.
- f. Berkurangnya minat tenaga muda di sektor pertanian, yang cenderung lebih memilih bekerja pada sektor industri dan sektor lainnya.
- g. Belum adanya regulasi daerah yang menaungi RDTR dan perizinan usaha lingkup peternakan dan kesehatan hewan sehingga kurang mendukung iklim investasi berusaha dalam sektor hulu dan pasca panen peternakan.

#### **Urusan Perikanan**

- a. Lemahnya pemodalannya dalam menunjang usaha perikanan terutama usaha kecil dan menengah.
- b. Kuota BBM bersubsidi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan masih terbatas.
- c. Pengelolaan pemasaran dan teknologi pengolahan perikanan yang belum memadai.
- d. Peningkatan alih fungsi lahan potensial budidaya perikanan ke kegiatan non sektor perikanan.
- e. Masih lemahnya kelembagaan kelompok nelayan dan rendahnya kualitas sumber daya pelaku usaha sektor perikanan.

#### **b. Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

***Urusan Pangan :***

- a. Tersedianya lahan pekarangan dan belum dikelola secara optimal untuk penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal;
- b. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui dana APBN pada dana Tugas Pembantuan serta dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi.

***Urusan Pertanian :***

- a. Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha.
- b. Perkembangan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan yang semakin baik memberikan peluang dalam pengembangan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.
- c. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan perikanan melalui APBN pada Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan serta dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi.
- d. Meningkatkan permintaan pasar terhadap produk-produk pertanian.

***Urusan Perikanan***

- a. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan secara optimal. Dan Letak yang strategis Kota Tanjungpinang sangat menguntungkan untuk pemasaran produksi perikanan.
- b. Tingginya permintaan ikan untuk memenuhi pasar lokal dan dan luar negeri, yang mana perikanan memiliki potensi sebagai salah satu sektor unggulan.
- c. Tingginya permintaan ikan untuk memenuhi pasar lokal dan dan luar negeri, yang mana perikanan memiliki potensi sebagai salah satu sektor unggulan.
- d. Adanya kebijakan dan dukungan pemerintah untuk pengembangan usaha perikanan dengan memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil.

- e. Peluang investasi pada bidang pengolahan dan pemasaran produk perikanan dengan keunggulan jenis dan kualitas produk.

#### 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja yang berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2024-2026 untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Pengusulan kegiatan juga memperhatikan usulan dari masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, terutama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan dan memperhatikan Kebijakan Nasional yang tertuang dalam bentuk Program Prioritas Nasional untuk mendukung tercapainya Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Tujuan OPD merupakan wujud dari sasaran yang akan dicapai pada RPD. Sasaran dalam RPD adalah Meningkatnya Produksi Perikanan dan Terwujudnya Ketahanan Pangan. Sasaran ini dalam rangka mewujudkan tujuan RPD untuk tercapainya Visi Kota Tanjungpinang, yaitu : “Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan berperan pada unsur visi untuk mewujudkan “Kota yang Maju dan Sejahtera”

Dari Sasaran RPD tersebut, tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang

diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Ketersediaan Pangan
3. Meningkatnya Konsumsi dan Keamanan Pangan
4. Meningkatnya Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
5. Meningkatnya produksi Komoditi Pertanian Lokal
6. Meningkatnya produksi Komoditi Peternakan Lokal
7. Meningkatnya produksi Perikanan

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Dengan adanya tujuan dan sasaran maka dijabarkan program dan kegiatan yang merupakan upaya yang akan ditempuh untuk mencapai Pembangunan sebagaimana RPD 2024-2026.

Dalam implementasinya agar program dan kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi maka masing – masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Matriks Rencana Kerja tersebut berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2024-2026, dengan memperhatikan program, kegiatan, indikator, target dan pagu indikatif pada Rencana Kerja Tahun 2025.

Matrik Rencana Kerja Tahun 2025 sebagaimana berikut :

diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan.
2. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan.
3. Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan.
4. Meningkatnya produktivitas perikanan.
5. Meningkatnya daya saing produksi perikanan.

### **3.2. Program dan Kegiatan**

Dengan adanya tujuan dan sasaran maka dijabarkan program dan kegiatan yang merupakan upaya yang akan ditempuh untuk mencapai Pembangunan sebagaimana RPD 2024-2026

Dalam implementasinya agar program dan kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi maka masing – masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Matriks Rencana Kerja tersebut berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan program, kegiatan, indikator, target dan pagu indikatif pada Rencana Kerja Tahun 2025

Matrik Rencana Kerja Tahun 2025 sebagaimana berikut :

**Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DP3							Rp 13.347.000.000				Rp 13.617.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		60					
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						Rp 12.397.000.000				Rp 12.277.000.000
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	nilai	Tanjungpinang	75	Rp 11.952.000.000			75	Rp 11.802.000.000
2.09.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Tanjungpinang	100	Rp 7.100.000.000			100	Rp 7.200.000.000
2.09.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Tanjungpinang	60	Rp 7.100.000.000	APBD Kota		65	Rp 7.200.000.000
2.09.01.2.05	Kegiatan Admiistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Admiistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	Tanjungpinang	100	Rp 50.000.000			100	Rp 50.000.000
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	Tanjungpinang	1	Rp 50.000.000	APBD Kota		1	Rp 50.000.000
2.9.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Tanjungpinang	90	Rp 80.000.000			90	Rp 80.000.000
2.09.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tanjungpinang	5	Rp 40.000.000	APBD Kota		5	Rp 40.000.000
2.09.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Tanjungpinang	4	Rp 40.000.000	APBD Kota		4	Rp 40.000.000
2.09.01.2.06	Kegiatan Admnsitrasi Umum Perangkat Daerah.	Kegiatan Admnsitrasi Umum Perangkat Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	%	Tanjungpinang	100	Rp 800.000.000			100	Rp 800.000.000
2.09.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan / Komponen Instalasi Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan / Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	1	Rp 15.000.000	APBD Kota		1	Rp 15.000.000
2.09.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	5	Rp 75.000.000	APBD Kota		5	Rp 75.000.000
2.09.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	1	Rp 50.000.000	APBD Kota		1	Rp 50.000.000
2.09.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	5	Rp 100.000.000	APBD Kota		5	Rp 100.000.000
2.09.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	2	Rp 70.000.000	APBD Kota		2	Rp 70.000.000
2.09.01.2.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material.	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	1	Rp 15.000.000	APBD Kota		1	Rp 15.000.000
2.09.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Tanjungpinang	12	Rp 375.000.000	APBD Kota		12	Rp 375.000.000
2.09.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp 100.000.000	APBD Kota		1	Rp 100.000.000

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025					Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik	%	Tanjungpinang	100	Rp 925.000.000			100	Rp 825.000.000
2.09.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Tanjungpinang	2	Rp 500.000.000	APBD Kota		6	Rp 400.000.000
2.09.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Tanjungpinang	15	Rp 50.000.000	APBD Kota		15	Rp 50.000.000
2.09.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Tanjungpinang	29	Rp 375.000.000	APBD Kota		29	Rp 375.000.000
2.09.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Tanjungpinang	100	Rp 1.900.000.000			100	Rp 1.900.000.000
2.09.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	Tanjungpinang	12	Rp 200.000.000	APBD Kota		12	Rp 200.000.000
2.09.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	Tanjungpinang	12	Rp 100.000.000	APBD Kota		12	Rp 100.000.000
2.09.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Tanjungpinang	12	Rp 1.600.000.000	APBD Kota		12	Rp 1.600.000.000
2.09.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik	%	Tanjungpinang	100	Rp 947.000.000			100	Rp 947.000.000
2.09.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Tanjungpinang	24	Rp 570.000.000	APBD Kota		24	Rp 570.000.000
2.09.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Tanjungpinang	50	Rp 60.000.000	APBD Kota		50	Rp 60.000.000
2.09.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Tanjungpinang	1	Rp 100.000.000	APBD Kota		1	Rp 100.000.000
2.09.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	Tanjungpinang	1	Rp 150.000.000	APBD Kota		1	Rp 150.000.000
2.09.01.2.09.0008	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Bulan	Tanjungpinang	1	Rp 67.000.000	APBD Kota		1	Rp 67.000.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						Rp 445.000.000				Rp 475.000.000
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT.	Skor PPH	%	Tanjungpinang	73	Rp 210.000.000			73	Rp 220.000.000
2.09.03.2.01.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	%	Tanjungpinang	100	Rp 100.000.000			100	Rp 105.000.000
2.09.03.2.01.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Sub Kegiatan Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	Tanjungpinang	1	Rp 20.000.000			1	Rp 25.000.000
2.09.03.2.01.01.0011	Sub Kegiatan Pemantaun Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Sub Kegiatan Pemantaun Stok Pangan	Informasi stok pangan	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp -			1	Rp -
2.09.03.2.01.01.0015		Sub Kegiatan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp 50.000.000	APBD Kota		1	Rp 50.000.000

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	11	12	9	10	11	12
2.09.03.2.01.01.0012	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten Kota	laporan	Tanjungpinang	1	Rp 15.000.000	APBD Kota		1	Rp 15.000.000
2.09.03.2.01.01.0013		Sub Kegiatan Penyusunan Prognosa Neraca Bahan Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	laporan	Tanjungpinang	1	Rp 15.000.000	APBD Kota		1	Rp 15.000.000
2.09.03.2.02.	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota.</b>	<b>Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	%	Tanjungpinang	100	Rp 70.000.000			100	Rp 75.000.000
2.09.03.2.02.03.	Sub Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota.	Sub Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota.	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	Tanjungpinang	10	Rp 70.000.000	APBD Kota		10	Rp 75.000.000
2.09.03.2.04.	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan angka kecukupan gizi</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan angka kecukupan gizi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	%	Tanjungpinang	100	Rp 40.000.000			100	Rp 40.000.000
2.09.03.2.04.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	Tanjungpinang	1	Rp 40.000.000	APBD Kota		1	Rp 40.000.000
2.09.04.	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN.</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN.</b>	<b>Persentase Penurunan kelurahan Rentan Pangan</b>	%	Tanjungpinang	10	Rp 105.000.000	APBD		10	Rp 115.000.000
2.09.04.2.01.	<b>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.</b>	<b>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.</b>	<b>Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan</b>	%	Tanjungpinang	10	Rp 105.000.000	APBD Kota		10	Rp 115.000.000
2.09.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.	Sub Kegiatan Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimuktahirkan	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp 105.000.000	APBD Kota		1	Rp 115.000.000
2.09.05.	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN.</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN.</b>	<b>Persentase Keamanan dan Mutu Pangan</b>	%	Tanjungpinang	85	Rp 130.000.000	APBD		85	Rp 140.000.000
2.09.05.2.01.	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota.</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota.</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	Tanjungpinang	85	Rp 130.000.000			85	Rp 140.000.000
2.09.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota.	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp 50.000.000	APBD Kota		1	Rp 60.000.000
2.09.05.2.01.0006	Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp 30.000.000			1	Rp 30.000.000
2.09.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan dan Mutu pangan segar asal tumbuhan	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp 50.000.000			1	Rp 50.000.000
3.25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.</b>					Rp 390.000.000				Rp 420.000.000
3.25.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP.</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun ini</b>	<b>Ton</b>	<b>Tanjungpinang</b>	<b>3600</b>	<b>Rp 130.000.000</b>			<b>3650</b>	<b>Rp 140.000.000</b>
3.25.03.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.</b>	<b>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia</b>	<b>unit</b>	<b>Tanjungpinang</b>	<b>8</b>	<b>Rp 25.000.000</b>			<b>10</b>	<b>Rp 25.000.000</b>
3.25.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	Tanjungpinang	8	Rp 25.000.000	APBD Kota		10	Rp 25.000.000

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	11	12	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.	Jumlah Sarana Usaha Penakan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	Tanjungpinang			APBD Kota			Rp -
<b>3.25.03.2.02.</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten / Kota.</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten / Kota.</b>	<b>Persentase Jumlah Nelayan, Kelompok Nelayan dan Unit usaha yang terbina</b>	<b>%</b>	<b>Tanjungpinang</b>	<b>6,5</b>	<b>Rp 105.000.000</b>			<b>7</b>	<b>Rp 115.000.000</b>
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Tanjungpinang	100	Rp 70.000.000	APBD Kota		100	Rp 80.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	Tanjungpinang	45	Rp 15.000.000			50	Rp 15.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	unit usaha	Tanjungpinang	1200	Rp 20.000.000			1300	Rp 20.000.000
<b>3.25.04.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA.</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>ton</b>	<b>Tanjungpinang</b>	<b>175</b>	<b>Rp 130.000.000</b>			<b>190</b>	<b>Rp 140.000.000</b>
<b>3.25.04.2.02.</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil.</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil.</b>	<b>Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang terbina</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Tanjungpinang</b>	<b>10</b>	<b>Rp 10.000.000</b>			<b>10</b>	<b>Rp 20.000.000</b>
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	Kelompok	Tanjungpinang	10	10.000.000			10	20.000.000
3.25.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti Pembentukan dan Pengembangan	Kelompok	Tanjungpinang	15				15	
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan TEKnologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan TEKnologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	Tanjungpinang	5		APBD Kota		5	
3.25.04.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi Bantuan pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan	Kelompok	Tanjungpinang	5				5	
<b>3.25.04.2.04.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.</b>	<b>Jumlah sarana prasarana dan Pembudidaya ikan</b>	<b>Orang</b>	<b>Tanjungpinang</b>	<b>150</b>	<b>Rp 120.000.000</b>			<b>150</b>	<b>Rp 120.000.000</b>
3.25.04.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Tanjungpinang	1				1	
3.25.04.2.04.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	Tanjungpinang	4	50.000.000			4	50.000.000
3.25.04.2.04.0009	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	Tanjungpinang	15	70.000.000			15	70.000.000
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui	Dokumen	Tanjungpinang	1					
3.25.04.2.04.05	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan	Orang	Tanjungpinang	150					
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN.</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN.</b>	<b>Jumlah Produksi Hasil Pengolahan</b>	<b>ton</b>	<b>Tanjungpinang</b>	<b>297,84</b>	<b>Rp 130.000.000</b>			<b>312,73</b>	<b>Rp 140.000.000</b>
<b>3.25.06.2.02.</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.</b>	<b>Jumlah Produksi Hasil Pengolahan</b>	<b>unit usaha</b>	<b>Tanjungpinang</b>	<b>20</b>	<b>Rp 45.000.000</b>			<b>20</b>	<b>Rp 50.000.000</b>

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Sub Kegiatan pembinaan terhadap penerapan persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan skala Usaha dan Resiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah unit usaha	Tanjungpinang	20	Rp 45.000.000	APBD Kota		20	Rp 50.000.000	
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten Kota	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	pelaku usaha	Tanjungpinang	100	Rp 85.000.000			110	Rp 90.000.000	
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro kecil dalam 1 (satu) daerah kab/kota yang terfasilitasi	pelaku usaha	Tanjungpinang	100	Rp 85.000.000			110	Rp 90.000.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN.					Rp 560.000.000				Rp 770.000.000	
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan sarana pertanian	%	Tanjungpinang	94	Rp 130.000.000	Rp -	Rp -	96	Rp 160.000.000	
			Persentase peningkatan sarana peternakan	%	Tanjungpinang	10				10		
3.27.02.2.01	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan	kali	Tanjungpinang	12				12	Rp -	
3.27.02.2.01.1.0001	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan	Tanjungpinang	1				1	Rp -	
3.27.02.2.01.1.0002	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	Tanjungpinang	1				1	Rp -	
3.27.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota.	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota.	Jumlah SDG yang terkelola.	vub	Tanjungpinang	2	Rp 70.000.000			2	Rp 80.000.000	
3.27.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	vub	Tanjungpinang	1	Rp 25.000.000	APBD Kota		2	Rp 25.000.000	
3.27.02.2.02.0005		Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian			1	Rp 25.000.000				Rp 25.000.000	
3.27.02.2.02.0002		Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Tanjungpinang	2	Rp 20.000.000			2	Rp 30.000.000	
3.27.02.2.03	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan dalam Daerah Kabupaten Kota	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan dalam Daerah Kabupaten Kota			Tanjungpinang	3	Rp -	APBD Kota		3	Rp 20.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak/Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	laporan	Tanjungpinang	2				2	Rp -	
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	laporan	Tanjungpinang	1				1	Rp 20.000.000	
3.27.02.2.05	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				2	Rp -			2	Rp -	
	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	laporan	Tanjungpinang	1				1	Rp -	

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	11	12	9	10	11	12
3.27.02.2.06.	Kegiatan Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah di Kabupaten / Kota Lain.	Kegiatan Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah di Kabupaten / Kota Lain.	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana Produksi Peternakan.	%	Tanjungpinang	15	Rp 40.000.000			17	Rp 60.000.000
3.27.02.2.06.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain.	Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain.	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ton	Tanjungpinang	40		APBD Kota		1	Rp 20.000.000
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Benih /bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	Tanjungpinang	500	Rp 40.000.000	APBD Kota		520	Rp 40.000.000
3.27.03.	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN.</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN.</b>	<b>Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian</b>	%	Tanjungpinang	85	Rp 130.000.000			85	Rp 180.000.000
			<b>Tingkat Kemanfaatan Sapras Peternakan.</b>	%	Tanjungpinang	80				80	
3.27.03.2.02	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.	Jumlah prasarana pertanian	unit	Tanjungpinang	2	Rp 130.000.000			2	Rp 180.000.000
			Rasio kebutuhan dan ketersediaan prasarana peternakan.	%	Tanjungpinang	5				5	
3.27.03.2.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Paket	Tanjungpinang	2	Rp 90.000.000	APBD Kota		3	Rp 130.000.000
3.27.03.2.02.0014	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun dan di rehabilitasi serta beroperasi								
3.27.03.2.00015		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit		2	Rp 40.000.000				Rp 50.000.000
3.27.04.	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN.</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER.</b>	<b>Status Kesehatan Hewan (%)</b>	%	Tanjungpinang	99	Rp 120.000.000			99	Rp 160.000.000
			<b>% Pangan Segar Asal Hewan Yang Memenuhi Pesyaratn Keamanan dan Mutu Pangan.</b>	%	Tanjungpinang	78				79	
							Rp 30.000.000				Rp 40.000.000
3.27.04.2.01		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit.	%	Tanjungpinang	100				100	
3.27.04.2.01.01	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah ata kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	laporan	Tanjungpinang	1	Rp 30.000.000	APBD Kota		1	Rp 40.000.000
3.27.04.2.03.	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Persentase Penyakit Hewan yang tertangani.	%	Tanjungpinang	85	Rp 40.000.000			87	Rp 60.000.000
3.27.04.2.03.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	laporan	Tanjungpinang	1	Rp 40.000.000	APBD Kota		1	Rp 60.000.000
3.27.04.2.04.	Kegiatan Penerpan dan Pengawasan Pesyaratn Teknis Kesehatan Masyarakat Veteiner.	Kegiatan Penerpan dan Pengawasan Pesyaratn Teknis Kesehatan Masyarakat Veteiner.	Jumlah Produk Hewan yang Memenuhi Pesyaratn Teknis Kesehatan Masyarkat Veteriner.	unit usaha	Tanjungpinang	5	Rp 50.000.000			5	Rp 60.000.000
3.27.04.2.04.02	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	laporan	laporan	1	Rp 50.000.000	APBD Kota		1	Rp 60.000.000

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		4	5	6	11	12	9	10	11	12	
3.27.07	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	Tanjungpinang	30	Rp 60.000.000			35	Rp 110.000.000	
3.27.07.2.01	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah lahan yang dilakukan pengendalian dan bencana pertanian	Ha	Tanjungpinang	5	Rp 60.000.000			5		
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	Tanjungpinang	5	Rp 60.000.000			5	Rp 110.000.000	
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN.	Persentase Penyuluhan	%	Tanjungpinang	95	Rp 120.000.000	APBD		100	Rp 160.000.000	
			Peningkatan status kelembagaan tani ternak	%		5				5		
3.27.07.2.01.	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.	Jumlah Penyuluhan	%		60	Rp 120.000.000			70	Rp 160.000.000	
3.27.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Dilengkapi Kapasitasnya	unit	Tanjungpinang	62	Rp 50.000.000	APBD Kota		72	Rp 60.000.000	
3.27.07.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	Tanjungpinang	10	Rp 20.000.000	APBD Kota		10	Rp 30.000.000	
3.27.07.2.01.05	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota.	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota.	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	Tanjungpinang	3	Rp 50.000.000	APBD Kota		3	Rp 70.000.000	
x	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG X.X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG X.X					Rp 150.000.000				Rp 150.000.000	
x.xx	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tanjungpinang		Rp 150.000.000		Rp		Rp 150.000.000	
					Tanjungpinang							
X.XX.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	Tanjungpinang	100	Rp 150.000.000			12	Rp 150.000.000	
x.xx.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang meliputi Pendidikan dan Pelatihan	orang	Tanjungpinang	25	Rp 150.000.000			25	Rp 150.000.000	

Tanjungpinang, Februari 2024  
Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan  
Kota Tanjungpinang,  
  
**YONI FADRI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700503 200312 1 016

#### BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang tahun 2025 ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang, APBD Provinsi dan APBN, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja ini dengan sebaik-baiknya. Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Februari 2024  
Kepala Dinas Pertanian Pangan dan  
Perikanan

Kota Tanjungpinang,



**YONI FADRI**

Pembina Tk.I

NIP. 19700503 200312 1 006